

## BIROKRASI

## KPU Akui Sirekap Belum Maksimal

**TERNATE** - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dinilai belum maksimal dalam meng-update hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut). Salah satu kendalanya adalah jaringan. Hal ini diakui komisioner KPU Provinsi Malut, Hi. Buchari Mahmud.

Berdasarkan data pada menu hitung suara di situs KPU yang mengupdate perolehan suara peserta pemilihan melalui sirekap, dari 8 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, 3 di antaranya belum 100 persen. Tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) 49 persen, Halmahera Utara (Halut) 50,59 persen, dan Halmahera Selatan (Halsel) 9,13 persen. Sementara sisahnya sudah 100 %. (data pertanggal 23 Desember 2020).

"Selain karena aplikasi sirekap ini baru diterapkan di Pilkada 2020 sehingga sempat mengalami *error* di awal-awal penghitungan suara 9 Desember lalu. Salah satu kendalanya adalah jaringan, terutama di Halut, Halsel, dan Halbar, sehingga posting formulir hasil-KWK ke Sirekap terkendala," sebut Buchari, baru-baru ini.

Karenanya, menurut Buchari, hal ini harusnya menjadi informasi penting bagi pemerintah, khususnya di tiga kabupaten tersebut agar lebih memperhatikan jaringan telekomunikasi. "Ini informasi penting bagi pemerintah, dan menjadi proyeksi sekaligus evaluasi bahwa pentingnya pengembangan teknologi dan informasi," tuturnya.

Terkait tiga kabupaten yang sampai saat ini belum 100 persen terupdate perolehan suara peserta pemilihan di situs KPU, akan terus diupayakan untuk mencapai 100 persen. "Karena dokumen C Hasil ini bukan hanya sekadar info ke publik untuk saat ini saja, tapi merupakan dokumentasi terkait hasil pemilihan kepala dan wakil kepala daerah tahun 2020," tambah Buchari. (mg-01/jfr)

## Burhan Bakal Polisikan Tauhid

## Tauhid: Saya No Comment

Peliput : **Alfandi Bambang**  
Editor : **Jufri Duwila**

**TERNATE** - Calon Wali Kota Ternate nomorur 2, M. Tauhid Soleman bakal dipolisikan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman melalui kuasa hukumnya, Muhammad Conoras.

Muhammad Conoras mengatakan akan melaporkan mantan Sekkot Ternate itu karena diduga telah mengelu-

arkan kata-kata yang dinilai mengandung unsur fitnah dan hinaan terhadap Burhan Abdurahman melalui sebuah rekaman video.

Conoras mengaku sudah mengantongi video tersebut. Ia menjelaskan, dalam video tersebut, M. Tauhid Soleman mengatakan bahwa Burhan Abdurahman memeras beberapa SKPD. Selain itu, Burhan juga disebut sebagai wali kota terbodoh di seluruh Indonesia.

Sehingga, menurut Conoras hal itu masuk dalam bentuk pelanggaran memfitnah dan penghinaan. "Menurut hukum, itu masuk pada ranah fitnah

dan penghinaan sesuai pasal 310 dan 311 KUHP," kata Conoras, kemarin (25/12).

Meski begitu, pria yang kerap disapa Ko Ama ini mengaku masih akan mengkaji alur peredaran video tersebut, apakah melalui media sosial Facebook, WhatsApp atau medium lainnya. "Pengkajian dilakukan untuk bisa menafsirkan apakah dugaan pelanggaran masuk ranah kejahatan Ilmu Teknologi (IT) ataupun tindak pidana umum," ujarnya.

Conoras mengaku, laporan terhadap Tauhid tidak berkaitan dengan Pilwako Kota Ternate 2020, melainkan

menyangkut privasi Burhan Abdurahman. Video yang sudah dikantongi pihaknya tersebut akan disalin ke CD sebagai alat bukti untuk dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Karena Pak Burhan secara pribadi merasa namanya difitnah, selain itu ada kata-kata yang tidak layak dicetuskan oleh seorang calon pemimpin," tutup Conoras seraya mengatakan laporan ke kepolisian akan dimasukan hari ini.

Sementara M. Tauhid Soleman saat dikonfirmasi terkait hal tersebut enggan memberikan komentar panjang. "Saya *no comment*," singkat Tauhid. (mg-01/jfr)



MOMEN: Garda Muda TULUS tampak membantu petugas TNI Polri dalam mengatur arus lalu lintas di depan Gereja Eben Haezer, kemarin (25/12)

## Garda Muda TULUS Kawal Ibadah Natal

**TERNATE** - Sebanyak 30 orang Sentral Komando Garda Muda Tad Jam pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS) ikut membantu TNI/Polri dalam pengamanan ibadah Natal di Kota Ternate, Jumat (25/12).

Ketua Sentral Komando Hamka

Midum mengatakan, pihaknya mengerahkan

pemuda Garda Muda TULUS dilatarbelakangi sikap sosial dan terpanggil untuk turut menjaga saudara-saudara kaum Nasrani yang sedang merayakan Natal. "Tujuannya adalah agar Natal dapat berjalan lancar, aman, dan tertib,"

tuturnya, kemarin (25/12).

Dia menyebutkan beberapa gereja digaja Garda Muda TULUS. Di antaranya Gereja GPII, Gereja GMIH Eben Haezer, dan G.ST Wilbrodus Kristen Katolik.

"Kegiatan ini sebagai upaya untuk bisa membantu dalam menjaga jalannya ibadah Natal kepada saudara-saudara kita kaum Nasrani yang sedang beribadah sehingga bisa berjalan dengan lancar," tambah Hamka seraya berharap kerukunan dan keagamaan umat di Kota Ternate terus terjaga dan terjalin dengan baik. (mg-01/jfr)

**GEBYAR UNDIAN**

**AKHIR TAHUN**

**Akan di UNDI 3 UNIT HP & HADIAH MENARIK LAINNYA**

**\*DI UNDI TANGGAL 3 JANUARI 2021**

**MABO!!!! MARI BATOBO!!!!**

**MANDI BUSA**

**GAMES EMBER TUMPAH**

**OPERASIONAL WATERBOOM PER DESEMBER 2020**

**WEEKDAY - START PUKUL 10.00 WIT**  
**WEEKEND - START PUKUL 08.00 WIT**

**Waterboom Ternate** **+6281274503218**

**#BijakPakai Frekuensi**

**Lokmon Ternate** **lokaternate**

## MHB-GAS Siapkan Tiga Laporan ke DKPP

**TERNATE** - Tim Hukum pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate nomor 3 Muhammad Hasan Bay dan Asghar Saleh (MHB-GAS) rencananya akan melayangkan tiga laporan sekaligus ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Tiga laporan tersebut yakni masing-masing laporan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate, dan salah satu oknum Komisioner KPU Kota Ternate. "Jadi ada tiga laporan secara ter-

pisah," tandas Ketua Tim Hukum MHB-GAS, Muhammad Conoras, kemarin (25/12)

Conoras mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti terkait tiga laporan tersebut. Jika sudah rampung, rencananya akan diteruskan ke DKPP, Sabtu (26/12) hari ini. "Kalau tidak ada halangan, besok (hari ini, red) kita akan masukan laporannya ke DKPP," tegas Conoras.

Mengerucut ke oknum komisioner KPU Kota Ternate, Conoras menyebut bahwa yang bersangkutan diduga melakukan pertemuan

dengan tim sukses bayangan dari salah satu Paslon. Pertemuan itu terjadi beberapa hari sebelum hari H pencoblosan 9 Desember lalu.

Meski begitu, Conoras sendiri belum mau membeberkan ke publik oknum komisioner tersebut karena masih menunggu bukti dari saksi.

"Kami masih menunggu saksi yang mendapat informasi ini, karena ada bukti videonya. Nanti kita lihat dan kita kaji apakah pertemuan itu berkaitan dengan pemilihan atau tidak, jika berkaitan, kita akan membuat laporan," tutup Conoras. (mg-01/jfr)

## PDI-P Pertanyakan TPS di NHM

**TERNATE** - Sebanyak 632 karyawan PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) tak menyalurkan aspirasi mereka saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) 9 Desember 2020 lalu, karena menjalani karantina yang diterapkan oleh manajemen perusahaan pertambangan tersebut.

KPU Halut pun tidak menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam areal pertambangan, agar karyawan yang

merupakan penduduk Halut dapat menyalurkan hak konstitusi.

"Masalah itu sudah masuk dalam agenda kami, dan itu juga yang akan kami pertanyakan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara," ucap Sekretaris DPD PDI-P Provinsi Maluku Utara (Malut) Asrul Rasyid Ichsan, kemarin (25/12).

Asrul juga mempertanyakan kinerja KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu sebagai pengawas, yang selama ini terkesan mendiamkan persoalan ratusan

hak konstitusi warga Halut yang bekerja di pertambangan tersebut.

"KPU dan Bawaslu harus melindungi hak konstitusi semua warga negara. Ada ratusan warga Halut yang sementara oleh manajemen perusahaan melakukan karantina karena mempertimbangkan kesehatan karyawan," tandas Asrul.

Terkait hal ini, Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin saat dimintai tanggapan belum mau memberikan komentar lebih. "Kita belum bisa berkomentar karena Pilkada Halut sudah ke MK (Mahkamah Konstitusi), kalau kita komentar sekarang nanti jadi lain lagi," tandas Muksin.

Sementara Ketua KPU Malut Pudja Sutamat hingga berita ini dikirim belum berhasil dikonfirmasi. (mg-01/jfr)

## KIPP Minta Bawalsu Tuntaskan Semua Kasus

**TERNATE** - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta kepada Bawaslu di delapan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran, baik temuan maupun laporan dari pihak lain.

"Jumlah kasus yang ada di Bawaslu itu harus ditindak-



**NURDIN I. Muhammad**

lanjuti, baik administrasi, kode etik, maupun pidana. Terutama untuk pidana harus berakhir sampai pada putusan," pinta Nurdin, Jumat (25/12).

Terkhusus untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara, akademisi Universitas Khairun ini berharap agar Bawaslu bisa segera menindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal itu demi

memberikan efek jera kepada setiap pelaku agar tidak terulang pada pemilihan-pemilihan yang akan datang.

Nurdin bilang, dalam tahapan Pilkada 2020, jumlah pelanggaran yang paling banyak ditemukan KIPP adalah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh tim maupun peserta pemilihan. Sayangnya, sampai saat ini tidak ada sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut.

"Karena mungkin kekosongan norma dalam pelanggaran protokol kesehatan ini, juga tidak ada legalitas hukum yang kuat," tukasnya. (mg-01/jfr)